



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 2
Provinsi : Gorontalo
Pimpinan Sidang 1 : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D
Pimpinan Sidang 2 : Endang Sulastri, S.Sos, MPP
Notulis Aplikasi : Muhammad Fawwaz Raihanto
Notulis Offline: Muhammad Reza Fahlevy, Annisa Sahira Firdaus
Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Gorontalo	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Direktorat Perumahan dan Permukiman
2. Dinas Perhubungan Gorontalo	2. Kementerian Perhubungan	2. Direktorat Transportasi
3. Dinas Perikanan Gorontalo	3. Kementerian Pertanian	3. Direktorat Pangan dan Pertanian
4. Dinas Pertanian Gorontalo	4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4. Direktorat Lingkungan Hidup
5. Pengelola Bandara	5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Bantuan Keramba Jaring Apung HDPE	20	0	paket	Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak, karena belum ada di Renja KKP 2025, dan dapat diusulkan melalui mekanisme DAK		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Proyeksi dan usaha Pembudidayaan Ikan		Bantuan Peralatan / Sarana			Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Pemda Gorontalo : 1. Dalam rakortek, bantuan KJA HDPE diterima sebanyak 6 unit (Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Boalemo) → untuk mengejar target produksi perikanan 2. Kelompok calon penerima (CPCL) sudah siap. 3. Apabila memang ditolak pada Renja, mohon agar dapat dijadikan lokpri DAK untuk menu tersebut.		Kementerian KP 1. Belum bisa mengakomodir karena bantuan KJA belum ada di RO renja KKP 2025 dan terjadi pengurangan alokasi pelaksanaan tahun 2025, direkomendasikan untuk dialokasikan ke menu DAK pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil		Dit KP, Bappenas: 1. Saat ini belum ada RO Keramba Jaring Apung HDPE di Renja 2025. Di dalam menu DAK 2024 terdapat menu pembudidayaan menu usaha ikan skala kecil (terdapat KJA) 2. DAK 2025 masih menunggu arah kebijakan dan tematik sebelum penentuan lokasi prioritas.					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya	1	1	paket	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 Bertekanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Pembangunan SPAM Regional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		Diakomodir,	
		Pemda Gorontalo : 1. Sudah diakomodir pada saat Konreg 2. PKS sudah ada, pada saat konreg sudah dilakukan pembahasan dengan balai 3. Pipa transmisi perlu disiapkan DED nya oleh Dit SDA PUPR 4. Pada saat konreg kesepakatan yang dilaksanakan yang pipa transmisi 5. RC sudah ada (dibiayai oleh ADB), terdapat RC untuk perluasan lahan yang dibiayai oleh APBD		BPIW, Kementerian PUPR: 1. Perlu konfirmasi surat penyerahan DED ke BWS, informasinya belum diserahkan kepada BWS 2. Pada konreg, statusnya sudah ditangguhkan karena akan dilakukan pada 2027 menunggu PKS. 3. Pembiayaan sektor CK belum terdapat informasi SDA, Kementerian PUPR: 1. Perlu di detailkan nomenklatur usulannya, karena kalau SPAM Regional usulannya ke DJCK		Dit Perkim Bappenas: 1. SPAM Regional Gorontalo sudah pernah dilakukan oleh ADB, namun berdasarkan informasi terakhir, kegiatan ini tidak masuk ke anggaran PUPR, karena kegiatan ini termasuk ke MYC. 2. Surat izin pengambilan air baku belum ada, surat kesiapan lembaga pengelola juga belum ada 3. Direkomendasikan pembiayaan melalui KPBU atau pinjaman lainnya, namun masih dalam pembahasan 4. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di 2025 dapat siap dari hulu ke hilir (air baku, hingga transmisi) 5. Mengingat kegiatan ini bersifat MYC, dan keterbatasan fiskal		dengan catatan bahwa RC (11 dokumen; PKS, lahan, FS, DED, RAB, kesiapan lembaga pengelola, surat kesiapan daerah, izin penggunaan lahan, dll)	



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

						<p>maka perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan di 2025</p> <p>Dit Regional 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diakomodir dengan catatan apabila ada RC yang tidak terpenuhi maka usulan tidak diakomodir. 2. Pemda diminta mengirim kembali RC kepada KL, dan berkoordinasi terkait kesesuaian RC 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	Pembangunan IPLT Kabupaten Pohuwato	1	1	unit	Kab. Puwohato	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>Diakomodir,</p> <p>dengan catatan daerah perlu melengkapi seluruh RC, termasuk ketersediaan lahan</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 Intensitas Emisi GRK Menurut Menuju Net Zero Emission		15 Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas					
		<p>Pemda Gorontalo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa RC sudah lengkap (DED, izin sertifikat lahan, penetapan lokasi sesuai tata ruang) 2. Pohuwato saat ini masih bekerja sama dengan boalemo, Pelaksanaan masih on-call based 	<p>BPPW Gorontalo, Kementerian PUPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa diakomodir, RC sudah cukup lengkap; Jastek, DED, sertifikat lahan, dsb. yang perlu dilengkapi surat menerima aset. 2. Data calon pelanggan belum ada di balai <p>BPIW, Kementerian PUPR</p>	<p>Dit Perkim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan inpres, Pohuwato sudah bekerja sama dengan kabupaten Boalemo untuk pengelolaan air limbah. Apakah sudah terlaksana? Untuk sistem apakah berdasarkan jadwal atau masih on-call based? Sebelumnya 					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

			<ol style="list-style-type: none"> Secara prinsip bisa diakomodir, namun ada RC lain yang belum dilengkapi yaitu; surat komitmen dari DPRD untuk operasional IPLT, direktorat sanitasi butuh memperbarui surat minat (dari 2021 menjadi 2024) 	<ol style="list-style-type: none"> sudah dilakukan berapa kali penyedotan? Data calon pelanggan apakah sudah tersedia? Rencana IPLT nanti akan dikelola oleh siapa dan apakah sudah ditentukan tarifnya? Secara usulan mendukung, namun kepastian pelaksanaan masih menyesuaikan ketersediaan anggaran dan dibahas lebih lanjut saat TM <p>Dit Regional II</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu tindak lanjut dari Pemda untuk melengkapi RC 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
4	Pengendalian Banjir	3	1	sungai	Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir untuk sungai Bone, untuk 2 lainnya dibahas lebih lanjut		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 Intensitas Emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission		17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai		Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana			Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Pemda Gorontalo: 1. Beberapa RC sudah tersedia. 2. Kegiatan tidak berkaitan dengan kebutuhan pengadaan lahan	BWS, Kementerian PUPR; 1. Seharusnya menjadi 3 usulan yang berbeda, diprioritaskannya hanya di 1 sungai yaitu sungai Bone 2. Sungai Bone masih perlu ada pengadaan lahan karena pembangunan baru (misalnya sempadan sungai), masih perlu mencari tahu lebih dalam lagi terkait hal itu	Dit SDA : 1. Perlu upload RC di KRISNA agar Bappenas dapat mereview.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kabila, Lekobalo, Katialada	3	1	kawasan	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir, prioritas di kawasan lekobalo, 2 lainnya perlu dibahas lebih lanjut		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemda gorontalo : 1. Prioritas di wilayah Lekobalo 2. Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 3. Bone balango → kawasan kabila. Kab gorontalo utara → kawasan katialada		BPIW, Kementerian PUPR; 1. Pemilihan kawasan sudah sesuai dengan pembahasan saat kongreg, yang menjadi prioritas adalah kawasan lekobalo 2.		Dit Perkim : 1. Perlu konfirmasi apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kumuh terkait adanya peningkatan kualitas permukiman 2. Diakomodir di Kawasan Lekobalo, dan sudah masuk ke rencana kegiatan PUPR TA 2025			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Pembangunan Jalan GORR Segmen 3	15,14	0	km	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan PReservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			Jalan Strategis (ProPN)	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemda Gorontalo : 1. Segmen 1 selesai tahun ini, segment 2 sudah selesai. Segmen 3 menyambung dari segmen 2 ke pelabuhan Gorontalo 2. Selain kebutuhan jalan, terdapat kebutuhan terkait pengadaan lahan 3. Sudah disetujui oleh presiden pada ratas di 2017 untuk pengadaan kebutuhan jalan dan pengadaan lahan 4. GORR menyambungkan dari Bandara hingga ke Pelabuhan Gorontalo 5. Pembebasan lahan daerah merasa berat untuk melaksanakan, sudah mengajukan dalam ratas dan telah disetujui oleh presiden. Total		BPJN Gorontalo, Kementerian PUPR 1. Permasalahan GORR segmen 3; bahwa di segmen 3 ini terkendala mengenai lahan. Sementara RC sudah dituntaskan terkait DED dan amdal 2. Pada 22 Maret, Ada surat dari gubernur mengenai pembebasan lahan segmen 3 untuk meminta bantuan dari pusat kepada kepala balai; sebesar sekitar Rp 330 miliar 3. Pada 25 Maret, permintaan tersebut sudah diteruskan kepada DJBM PUPR; surat tersebut belum ada tanggapan Bina Marga, Kementerian PUPR 1. Mendapatkan surat permintaan Gubernur, namun belum ada		Dit Transport : 1. Ditolak karena kewenangan jalan tersebut masih non-nasional 2. Secara RC, lahan masih belum ada progres, harapannya dapat diselesaikan oleh Pemda 3. Dapat diusulkan pada periode RPJMN 2025-2029, dengan catatan pembebasan lahan dapat dicicil per tahun oleh Pemerintah Daerah 4. Bantuan terkait Pembebasan Lahan oleh PUPR sangat <i>selected</i> dan terbatas.			

Ditolak,

belum adanya kepastian terkait pembebasan lahan dari pusat



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		<p>anggaran pembebasan lahan mencapai Rp 300 M</p> <p>6. APBD yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan GORR mencapai Rp 200-300 M</p> <p>7. GORR sudah masuk dalam Paparan Menteri di Ranwal RKP 2025</p> <p>8. diharapkan segera ada kepastian dari pusat terkait pelaksanaan GORR, akan disampaikan juga terkait hasil ratas dari setneg.</p>	<p>persetujuan terkait permintaan tersebut untuk tahun 2025</p>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	Pembangunan Bandara Djalaludin Gorontalo	3	3	paket	Kab. Gorontalo	Kementerian Perhubungan	<p>Diakomodir,</p> <p>dengan catatan terdapat hal-hal yang perlu disiapkan oleh daerah termasuk; penajaman RC, ruang lingkup usulan dan review masterplan oleh kemenhub</p>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visioh		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		07 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		Prasarana Bidang Konektivitas Udara			Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Tahap II, Gorontalo	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
<p>Pemda Gorontalo :</p> <ol style="list-style-type: none"> Usulan : perpanjangan runway, taxiway, dan subsidi perintis Bandara Djalaluddin merupakan bandara alternatif bandara sam ratulangi, manado. Mengingat seringnya terjadi bencana di sulawesi utara, maka perlu 		<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan/perpanjangan tidak bisa mengesampingkan <i>demand</i>. Di dalam masterplan, pengembangan berikutnya akan dilaksanakan jika jumlah penumpang di atas 2 juta, 		<p>Dit Transport :</p> <ol style="list-style-type: none"> Diakomodir dalam indikasi pagu Ruang lingkup usulan subsidi belum diakomodir, dibahas lebih lanjut pada rakornis dishub (3 Mei 2024) Secara <i>demand</i> bandara masih cukup, ada pembahasan yang 					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		<p>dilakukan peningkatan fasilitas bandara djalaluddin gorontalo</p> <ol style="list-style-type: none">3. Rencana induk sudah di review, dan sudah ada surat keputusan Menhub4. Dengan adanya pembangunan IKN, posisi Gorontalo sangat strategis dalam penyediaan pangan.5. Saat ini Sulut menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara. Gorontalo saat ini juga sedang melakukan pengembangan pariwisata sehingga perlu didukung peningkatan bandara6. Pembebasan lahan tidak perlu, area perpanjangan sudah di dalam pagar7. Bandara ini diharapkan jadi embarkasi haji di wilayah timur8. Sudah dilakukan <i>review</i> oleh Kemenhub pada 20239. Prioritas 1 adalah pelapisan landasan pacu, prirotias kedua taxiway (saat ini hanya ada satu taxiway), kemudian perluasan apron <p>Pihak Pengelola Bandar Djalaluddin Gorontalo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan masterplan ruang lingkup yang diusulkan, (1) pelapisan landasan pacu seluas	<p>sedangkan hingga tahun 2023 masih di bawah 500rb</p> <ol style="list-style-type: none">2. Untuk perintis, belum diakomodir dalam SBPI sehingga akan dibahas lebih lanjut di TM3. Untuk embarkasi haji menjadi perhatian kami sehubungan dengan adanya pengurangan bandara internasional4. Usulannya dapat dipertajam ruang lingkupnya sehingga dapat kita bawa ke pembahasan TM	<p>menyampaikan bahwa pengembangan yang akan meningkatkan demand</p> <ol style="list-style-type: none">4. Apabila diakomodir, maka perlu dipilah terlebih dahulu usulan-usulan yang prioritas.5. Kemenhub agar melakukan review terkait usulan-usulan	
--	--	---	--	--	--



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		2500x45 m2, (2) Pelebaran apron (3) Pembangunan taxiway delta 2. Masterplan mulai berlaku di 2023.							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	Pembangunan Panti Terpadu Rehabilitasi Sosial	1	1	unit	Kab. Bone Bolango	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir, dengan catatan masih menunggu konfirmasi Kementerian PUPR dan koordinasi dengan Kementerian Sosial		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 Transformasi Sosial		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 Perlindungan Sosial yang Adaptif			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Susun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemda Gorontalo : 1. Sudah membuat surat sesuai dengan saran pada saat Rakortek (Panti menjadi rumah susun khusus). Surat sudah disampaikan ke MenPupr dan Mensos 2. Lahan sudah siap di Bone Bolango, sudah ada DED. Perizinan sudah dilengkapi (RTRW, Amdal)		DJ Perumahan, Kementerian PUPR 1. Hasil rakortek rebang, untuk rumah susun untuk sosial sudah ada tindak lanjutnya untuk bersurat ke kemensos terlebih dahulu sehingga kementerian PUPR perlu menunggu usulan dari kementerian sosial. 2. RC dari pemda sudah lengkap 3. Diakomodir dengan catatan masih menunggu arahan pimpinan		Dit PKPM : 1. Berharap diakomodir, namun tidak ada pagu untuk pembangunan rumah di kemensos 2. RC sudah lengkap, dan sudah dilakukan komunikasi dengan KemenPUPR			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	Rehabilitasi Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Posso	6		km	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kesehatan Sumber Daya Air	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		Prasarana Pendayagunaan air tanah untuk penyediaan air baku yang dibangun			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Pemda Gorontalo 1. Pada saat rakortekrenbang belum dibahas 2. DED sudah siap, RC hanya terkait DED 3. Kegiatan adalah terkait perbaikan beberapa pipa yang sudah bocor. tingkat kerusakan masih belum rusak parah. → merujuk ke operasi dan pemeliharaan		Kementerian PUPR 1. Kegiatan ini belum prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2025, karena 1) kegiatan berupa rehabilitasi, 2) dokumen lingkungan belum ada yang terupdate (hanya yang ketika pembangunan) 2. Belum ada informasi terkait tingkat kerusakan dan dampaknya 3. Secara timeline kegiatan akan dilakukan tahun 2026 4. Jika terkait dengan operasional dan pemeliharaan adalah kegiatan yang bersifat reguler yang alokasi untuk pemeliharaan ada setiap tahunnya 5. Nomenklatur perlu untuk diganti menjadi "Operasi dan		Dit SDA : 1.			
		Diakomodir, namun nomenklatur usulan diganti menjadi operasi dan pemeliharaan							



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
						Pemeliharaan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku"		
10	Optimalisasi TPA Regional Talumelito	1	1	unit	Kab. Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir, dengan catatan seluruh RC dilengkapi (termasuk justifikasi dan informasi lainnya yang perlu disiapkan sebelum pembahasan di TM	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission		15 Lingkungan Hidup Berkualitas		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional			
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Pemda Gorontalo : 1. Operasional TPA masih di PU. TPA perlu dioptimalisasi karena sudah penuh 2. RC sudah disampaikan (lahan, AMDAL, DED) 3. RC sudah dipenuhi semua, sudah beberapa kali dikunjungi untuk review 4. Optimalisasi untuk perluasan. Pengelolaan juga sudah dianggarkan (melayani 3 daerah)		BPPW, Kementerian PUPR: 1. RC sudah masuk di BPPW Gorontalo, namun justifikasi teknis masih kurang (perhitungan perluasan TPA)		Dit Perkim : 1. Belum dibahas pada saat rakortekrenbang 2. Optimalisasi yang dimaksud apakah perluasan TPA? 3. RC sudah cukup lengkap tapi masih perlu kesiapan penganggaran operasional dan pengelolaan.		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

11	Penanaman, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2025	1000		hektar	Provinsi Gorontalo	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekonomi		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Pemda Gorontalo : 1. Pada saat rakortekrenbang akan dibahas lebih lanjut, perlu konfirmasi dari pusat, terkait hal-hal yang perlu disiapkan 2. Prioritas pada DAS Bone, agar dapat didorong untuk menjadi lokpri DAK		Kementerian LHK 1. -		Dit LHK : 1. Rehabilitasi hutan ini termasuk lahan kritis, pengampunya ada di Direktorat KKSDA Dit KKSDA : 1. Usulan terbagi 2, (1) Kawasan hutan dan (2) luar kawasan hutan. Untuk kawasan hutan sudah dianggarkan dalam Belanja KL namun kepastian alokasi menunggu hasil TM. 2. Untuk luar kawasan hutan biasanya melalui DAK, masih menunggu kebijakan DAK. (Usulan tidak diakomodir)					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pengerukan Kolam Pelabuhan	1	1	Pelabuhan	Kota Gorontalo	Kementerian Perhubungan	Diakomodir,		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

	Penyeberangan Gorontalo	Transformasi Ekonomi		Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketiimpangan		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		dengan catatan seluruh RC perlu untuk siap, terutama AMDAL		
		Program		Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas		Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut		Prasarana Bidang Konektivitas Laut			Fasilitas Pendukung Prioritas Nasional	
		Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Pemda Gorontalo : 1. Pelabuhan mulai mengalami pendangkalan		Kementerian Perhubungan 1. Sangat dibutuhkan untuk diakomodir karena terjadi pendangkalan 2. Amdal akan dilaksanakan dalam waktu dekat bersamaan dengan waktu pengerukan karena khawatir ada batas berlakunya. Namun izin lingkungan untuk pelabuhan sudah ada		Dit Transportasi : 1. Perlu dilakukan penanganan. tapi perlu studi amdal, desain. Studi tsb telah dilaksanakan pada 2021. Perlu konfirmasi ke Kemenhub. Apabila studi tersebut sudah siap, maka dapat diakomodir				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga		Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan							
13	Pembangunan Rumah Susun ASN	1	1	Tower	Kab. Bone Bolango	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Diakomodir , dengan catatan perlu dipastikan kelengkapan seluruh RC dan perlu dipastikan pengelolaan (proses bisnis) pasca pembangunan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		01 Transformasi Sosial		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		02 Pendidikan Berkualitas yang Merata				
		Program	Kegiatan	KRO		RO				
		Program Perumahan dan kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI				
		Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Pemda Gorontalo : 1. Sudah diusulkan 4 kali. Sebelumnya diakomodir namun tidak sesuai usulan 2. Sudah siap lahan dan berbagai dokumen yang diperlukan	DJCK, Kementerian PUPR: 1. Berdasarkan hasil kongreg, sudah masuk dalam forum kesepakatan sebesar 44 unit. 2. Namun perlu dipastikan kelengkapan RC nya	Dit Perkim : 1. Setuju dengan Ditjen Perumahan, namun perlu memastikan pengelolaan nantinya pada saat telah terbangun.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	176	176	unit	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pertanian	Diakomodir, untuk 4 usulan; dengan catatan alokasi dan volume menyesuaikan pagu anggaran Kementan, serta e-proposal dapat dipastikan sudah disampaikan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Bappeda: 1. Perlu dipastikan informasi dari Kementan terkait hal-hal yang perlu disiapkan oleh daerah sebagai tindak lanjut 2. e-proposal sedang dalam proses penginputan 3. Lokasi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam rakortek kesepakatan 4. Sudah disetujui untuk diakomodir	Kementerian Pertanian 1.		Dit PPP, Bappenas: 1. Sudah disetujui untuk diakomodir di 4 usulan yang berkaitan dengan Kementan 2. Usulan alat dan mesin pertanian pra panen dibutuhkan lokasi 3. Volume dan alokasi akan menyesuaikan dengan pagu anggaran Kementan 4. Perlu dipastikan e-proposalnya dari daerah Kementan				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
15	Penanganan Longsor di ruas Jalan Nasional	6	6	titik	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Tidak ada catatan		Tidak ada catatan		Dit Transportasi : 1. Setuju untuk diakomodir, namun perlu dikonfirmasi terkait ruas-ruasnya dan penanganan apa yang harus dilakukan BPIW PUPR					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	Pengembangan Bandara Pohuwato	3	3	paket	Kab. Pohuwato	Kementerian Perhubungan	Diakomodir, dibahas lebih lanjut di TM untuk kesepakatan volumenya apakah diperpanjang hingga 1400 m atau 1600 m		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Pembangunan Bandar Udara Pohuwato			
		Catatan dan Tanggapan							
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Dinas Perhubungan Gorontalo, Bappeda Gorontalo <ol style="list-style-type: none"> Cakupan pekerjaan adalah perpanjangan Landasan (1,4 km). Pelaksanaan sebelumnya hanya 1,2 km untuk mengejar percepatan pelaksanaan). Perpanjangan diminta menjadi 1,6 km (untuk mencakup permintaan presiden untuk mengkomodir pesawat tipe ATR) Lahan sudah siap dan sudah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Demand sebesar 52 ribu Bandara Pohuwato dalam pelaksanaannya telah melibatkan Pemda-pemda, Provinsi Gorontalo melaksanakan jalan akses, Kabupaten Gorontalo melakukan pembebasan lahan. Saran agar dilakukan konfirmasi ulang mengingat arahan presiden adalah 1.6 km (Penambahan 0,4 km) 	Kementerian Perhubungan : <ol style="list-style-type: none"> Pohuwato merupakan bandara baru sehingga cukup untuk 1,400 meter untuk melayani ATR Pemda diharapkan dapat menciptakan <i>event</i> yang bersifat untuk meningkatkan demand di Bandara seperti pariwisata Sepakat dengan Bappenas untuk dibahas lebih lanjut dalam TM 	Dit Transport : <ol style="list-style-type: none"> Bandara Pohuwato masih perlu dibahas pada TM karena masih perlu konfirmasi terkait cakupan, mengingat baru dilaksanakan pada periode RPJMN sebelumnya Diakomodir 1,4 km. 1,6 km untuk pengembangan tahap 2 dan tahap Catatan : tetap perlu dibahas pada TM 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
17	Pengembangan Pelabuhan Tilamuta	4	4	paket	Kab. Boalemo	Kementerian Perhubungan	Diakomodir, selama RC sudah siap, pagu akan menyesuaikan dengan	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		Transformasi Ekonomi		Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	Pembangunan Pelabuhan Tilamuta	pembahasan TM (ketersediaan anggaran)	
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		Dinas Perhubungan : 1. Masterplan dan DED sudah ada, Lahan sudah <i>clear</i> . 2. Dokumen persetujuan perpanjangan dermaga sudah ada 3. reklamasi belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran 4. Dokumen Amdal sudah ada satu kesatuan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya	Tidak hadir	Dit Transport : 1. SBSN 2024 ada perpanjangan dermaga, ada pekerjaan pembangunan reklamasi yang belum selesai 2. <i>Readiness Criteria</i> terkait dokumen Amdal belum lengkap 3. Apabila RC lengkap, sepakat diakomodir dengan penyesuaian metode penanganan berdasarkan ketersediaan anggaran 4. Catatan dibahas lebih lanjut di TM, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
18	Kawasan Jagung	308,406	308,406	Ha	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pertanian	Diakomodir,
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan	Sarana Pengembangan Kawasan		Kawasan Jagung	
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			

untuk 4 usulan; dengan catatan alokasi dan volume menyesuaikan pagu anggaran Kementan, serta e-proposal dapat dipastikan sudah disampaikan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Bappeda: 1. Perlu dipastikan informasi dari Kementan terkait hal-hal yang perlu disiapkan oleh daerah sebagai tindak lanjut 2. e-proposal sedang dalam proses penginputan 3. Lokasi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam rakortek kesepakatan 4. Sudah disetujui untuk diakomodir	Kementerian Pertanian		Dit PPP, Bappenas: 1. Sudah disetujui untuk diakomodir di 4 usulan yang berkaitan dengan Kementan 2. Usulan alat dan mesin pertanian pra panen dibutuhkan lokasi 3. Volume dan alokasi akan menyesuaikan dengan pagu anggaran Kementan 4. Perlu dipastikan e-proposalnya dari daerah Kementan		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
19	Kawasan Aneka Cabai	100	100	Ha	7502 - Kab. Gorontalo, 7501 - Kab. Boalemo, 7503 - Kab. Pohuwato, 7504 - Kab. Bone Bolango, 7505 - Kab. Gorontalo Utara	018 - Kementerian Pertanian	Diakomodir, untuk 4 usulan; dengan catatan alokasi dan volume menyesuaikan pagu anggaran Kementan, serta e-proposal dapat dipastikan sudah disampaikan
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
Program	Kegiatan	KRO		RO			
HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1771 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		011 - Kawasan Aneka Cabai			
Catatan dan Tanggapan							
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		Bappeda: 1. Perlu dipastikan informasi dari Kementan terkait hal-hal yang perlu disiapkan oleh daerah sebagai tindak lanjut 2. e-proposal sedang dalam proses penginputan 3. Lokasi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam rakortek kesepakatan 1. Sudah disetujui untuk diakomodir	Tidakada catatan		Dit PPP, Bappenas: 1. Sudah disetujui untuk diakomodir di 4 usulan yang berkaitan dengan Kementan 2. Usulan alat dan mesin pertanian pra panen dibutuhkan lokasi 3. Volume dan alokasi akan menyesuaikan dengan pagu anggaran Kementan 2. Perlu dipastikan e-proposalnya dari daerah Kementan				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	93	93	Unit	Provinsi Gorontalo	Kementerian Pertanian	Diakomodir, untuk 4 usulan; dengan catatan alokasi dan volume menyesuaikan pagu anggaran Kementan, serta e-proposal dapat dipastikan sudah disampaikan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju		16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda: 1. Perlu dipastikan informasi dari Kementan terkait hal-hal yang perlu disiapkan oleh daerah sebagai tindak lanjut 2. e-proposal sedang dalam proses penginputan		Tidakada catatan		Dit PPP, Bappenas: 1. Sudah disetujui untuk diakomodir di 4 usulan yang berkaitan dengan Kementan 2. Usulan alat dan mesin pertanian pra panen dibutuhkan lokasi			



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		3. Lokasi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam rakortek kesepakatan 3. Sudah disetujui untuk diakomodir			3. Volume dan alokasi akan menyesuaikan dengan pagu anggaran Kementan 4. Perlu dipastikan e-proposalnya dari daerah Kementan			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
21	Bantuan Kapal Perikanan 5 s.d > 30 GT	20	0	Paket	Provinsi Gorontalo	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditolak,	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2337 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	QEG - Bantuan Peralatan / Sarana		003 - Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Sesuai catatan rakortek						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
22	Pembangunan PLTS Rooftop	30	0	Unit	Provinsi Gorontalo	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ditolak	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI GORONTALO

		02 - Transformasi Ekonomi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
		Program	Kegiatan	KRO	RO
		JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 - Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG - Bantuan Peralatan/ Sarana	006 - PLTS Terpadu
		Catatan dan Tanggapan			
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		Sesuai catatan rakortek			

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	18
Ditolak	4
Tidak Terbahas	0